



## PERAN PONDOK PESANTREN AL MU'MIN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SELOPAMPANG

**Deddi Fasmadhy Satiadharmanto\*, Imam Muhtadin\***

\*Universitas Muhammadiyah Jakarta

[fasmadhydeddi@gmail.com](mailto:fasmadhydeddi@gmail.com), [Imam.muhtadin@umj.ac.id](mailto:Imam.muhtadin@umj.ac.id)

### Informasi Artikel

Terima 19/12/2022  
Revisi 22/12/2022  
Disetujui 03/01/2023

### Kata Kunci:

Aktor, Ekonomi,  
Peran, Pondok  
Pesantren,  
Pemberdayaan  
Masyarakat.

### Keyword:

Actor, Economy,  
Role, Boarding  
School,  
Community  
Empowerment.

### A B S T R A K

*Pesatnya perkembangan kemajuan pondok pesantren tidak hanya pada meningkatnya kualitas secara kelembagaan pendidikan Islam, namun lebih luas lagi pada kontribusi perekonomian masyarakat sekitar di lingkungan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung dan para aktor dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Selopampang Temanggung. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Pondok pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung dengan sumber dayanya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Selopampang Temanggung.*

### A B S T R A C T

*The rapid development of the progress of Islamic Boarding Schools is not only in increasing the institutional quality of Islamic Education but more broadly in the economic contribution of the surrounding community to the Al Mu'min Muhammadiyah Islamic Boarding School, Tembarak, Temanggung. This study aims to analyze the role of Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung Islamic Boarding School and actors in efforts to empower the community's economy in Selopampang village, Temanggung. This research was conducted using library research and interviews with a qualitative descriptive approach. This research found that Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung Islamic boarding school with resources could increase the economy of the people of Selopampang Village, Temanggung.*

## **PENDAHULUAN**

Potensi yang dimiliki Desa Selopampang pada perekonomian masyarakat dengan faktor pendukung strategis adanya lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung, sangat menarik untuk dikaji. Adaptasi pola Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung pada pengembangan ekonomi masyarakat Desa Selopampang Temanggung melalui aktivitas santri pada lingkungan Desa Selopampang berdampak signifikan secara ekonomi. Tanpa masyarakat Desa Selopampang sadari, simbiosis mutualisme terjadi di lingkungan Desa Selopampang.

Peranan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah tidak dibatasi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam, akan tetapi sebagai referensi utama dalam kehidupan keberagaman dan kemasyarakatan Desa Selopampang Temanggung. Potensi dan integritas yang dimiliki Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah dipandang masyarakat Desa Selopampang sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang melakukan pengembangan ekonomi Islam dengan pemberdayaan pesantren yang berkualitas sebagai suatu kebutuhan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai suatu kualitas, pondok pesantren memiliki keunggulan pada para aktor ustaz dan santri yang memahami premis ekonomi Islam dengan teori-teori yang terukur.

Ekonomi syariah dapat dikembangkan sebagai potensi pemberdayaan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa Selopampang. Upaya pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan untuk tujuan kesejahteraan di desa Selopampang. Penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) merupakan awal dari konsep pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini meliputi kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*). Apabila masyarakat sudah memiliki modal sosial yang kuat, mereka akan lebih mudah untuk diarahkan dan diatur. Transfer pengetahuan kepada masyarakat yang memiliki modal sosial kuat juga akan berjalan lebih gampang. Modal sosial yang kuat akan memperkuat pengetahuan di masyarakat, meningkatkan modal atau uang, dan memperkokoh orang-orangnya. Secara substansi,

pemberdayaan masyarakat merupakan transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif guna mencapai kesejahteraan sosial.

Konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan secara strategis. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya tanpa memandang keinginan dan kemauan orang lain tersebut.

Pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010).

Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah berusaha melakukan optimalisasi ekonomi syariah dengan memadukan pendidikan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan bagi Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah untuk selalu berakselerasi dan *up to date* dengan perkembangan zaman serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Strategisnya, peranan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Sumber daya yang dimiliki Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah menambah keunikannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah dapat menjadi pionir dalam memajukan perekonomian lokal Desa Selopampang Kabupaten Temanggung dan bagaimana lingkungan sekitar pondok pesantren di Desa Selopampang menjadi wilayah yang sejahtera melalui pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Konsep Pondok Pesantren**

Sejak berabad-abad yang lalu, Indonesia telah memiliki lembaga pendidikan Islam tradisional yang dikenal sebagai pondok pesantren. Pondok pesantren terus berkembang dan tumbuh hingga saat ini. Penyebutan pesantren sebenarnya berasal dari kata "santri" yang diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pesantrian (pesantren). Santri berarti orang yang menuntut ilmu agama Islam, sedangkan pesantren berarti tempat tinggal para santri (Hanun Asrohah, 2004: 20). Di Pulau Jawa dan Madura, pesantren juga sering disebut dengan pondok. Di Aceh, konsep lembaga pendidikan

agama tradisional disebut meunasah, dan di Sumatera Barat disebut surau (Akhmad Faozan, n.d.).

Pondok pesantren dengan demikian bukan hanya sebagai tempat pendidikan, melainkan juga sebagai tempat tinggal para santri. Oleh karena itu, pondok pesantren memiliki karakteristik sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral dan memiliki sistem pendidikan yang sama dengan sistem yang dilakukan oleh akademi militer, artinya para penghuninya tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dapat mengambil pengalaman secara integral di tempat tersebut (Marzuki Wahid, 2001).

Pondok pesantren memiliki fungsi yang tidak dapat lepas dari hakikatnya, yaitu sebagai lembaga pendidikan informal sederhana yang berasal dari masyarakat desa. Oleh karena itu, pondok pesantren juga berfungsi sebagai agen pembangunan desa tempatnya berada. Perkembangan dan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kontribusi dan peran pondok pesantren dari segala bidang, seperti pendidikan, ekonomi tentu juga agama yang mengarah pada nilai-nilai normatif, edukatif, dan progresif.

Jika diuraikan, pondok pesantren memiliki enam fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, dakwah, sosial, produksi, konsumsi, dan agen perubahan.

#### 1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan

Fungsi utama pondok pesantren pada mulanya adalah sebagai tempat untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama pada penduduk setempat di desa-desa yang hanya bersifat sederhana. Namun pada perkembangannya, pondok pesantren tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang secara reguler diikuti oleh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memberikan tidak hanya pengetahuan mengenai agama, tetapi juga pelajaran-pelajaran umum yang berguna untuk kehidupan. Menurut M. Bahri Ghazali (2002), pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pesantren dapat dibagi menjadi dua jenis.

- a. Pendidikan material, yaitu pengkhataman kitab kuning bagi setiap santrinya. Mereka diharapkan mampu mengkhatamkan dan membaca kitab kuning sesuai dengan target yang diharapkan dari segi materialnya terlepas dari apakah santri mampu memahami isi yang tersirat di dalam kitab tersebut.
- b. Pendidikan immaterial, yaitu pembentukan karakter santri di mana santri dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupannya sehari-hari.

#### 2. Pesantren sebagai lembaga dakwah

Sebagai lembaga pendidikan agama Islam, tentu pesantren tidak lepas dalam berperan menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat. Pesantren berkiprah dalam usaha melakukan kegiatan yang dapat menanamkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau menekuni dan mengamalkan ajaran agama secara konsisten sebagai seorang muslim. Berbagai kegiatan dakwah yang biasa dilakukan oleh pesantren adalah sebagai berikut.

- a. Mengadakan pengajian dan membentuk kelompok pengajian untuk masyarakat. Kegiatan pengajian adalah sarana bagi pesantren untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan agama bagi masyarakat umum. Tidak hanya itu, pengajian juga dalam perkembangannya menjadi mediasi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, mulai dari permasalahan keluarga hingga ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan pengajian juga dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi antara pondok pesantren dengan masyarakat.
- b. Memadukan kegiatan dakwah dengan kegiatan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat, seperti olahraga, diskusi, atau kegiatan lain yang masih sesuai dalam koridor Islam, tetapi diselipkan juga di dalamnya ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat melakukan aktivitas tersebut dengan senang sambil tanpa disadari juga belajar agama.

### 3. Pondok pesantren sebagai lembaga sosial

Sebagai lembaga yang muncul di tengah masyarakat, tentu pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan pesantren dalam menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi bukan hanya sebatas aspek kehidupan duniawi, melainkan juga kehidupan ukhrawi. Menurut Sudjoko, peran jasa terbesar pesantren terhadap masyarakat adalah bimbingan yang diberikan pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Contoh nyata peran pondok pesantren dapat kita lihat dari segi ekonomi, yaitu upaya pondok pesantren untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan pesantren itu sendiri agar dapat hidup dengan lebih mapan. Santri-santri di pondok pesantren biasanya dididik agar mandiri dalam membiayai dirinya sendiri. Demikian pula, masyarakat diajarkan agar mampu mengatur dirinya dan menjadi mandiri secara ekonomi.

### 4. Pesantren sebagai lembaga produksi

Agar mampu mandiri dan dapat berkembang secara ekonomi, pesantren mau tidak mau harus tumbuh menjadi pelaku usaha. Di sini, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi. Supaya dapat eksis di dunia usaha, pesantren perlu untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan produknya. Tanpa inovasi, perkembangan usaha yang dimiliki pondok pesantren akan cenderung stagnan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah efisiensi ekonomis. Caranya adalah dengan mengefisienkan faktor produksi yang dimiliki dan mengembangkan diversifikasi produk dan tenaga kerja. Efisiensi ekonomis mengacu pada nilai *output* terhadap *input*, atau nilai sumber daya (faktor produksi) yang dipakai untuk menghasilkan *output*. Pengukuran efisiensi ekonomis mensyaratkan nilai-nilai ditempatkan pada komoditas (Achmad Room Fitrianto, n.d.: 5).

5. Pesantren sebagai lembaga konsumsi

Pesantren sebagai lembaga konsumsi tampak dari jumlah barang produksi yang diserap oleh pesantren baik oleh santri maupun lembaga pesantren itu sendiri. Selain itu, pesantren sebagai lembaga produksi juga akan mengonsumsi bahan baku untuk memproduksi barang. Jumlah konsumsi pesantren dengan demikian tidaklah sedikit.

6. Sebagai agen perubahan

Fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan, namun fungsi terpenting pesantren adalah sebagai agen perubahan di masyarakat. Pendidikan telah menjadi salah satu bagian terpenting bagi masyarakat muslim sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan, berperan menjadi agen perubahan yang nyata, dan hal tersebut sangat terasa pada masa penjajahan. Perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan banyak yang berangkat dari pesantren dengan santri-santrinya sebagai syuhada-syuhada yang maju berperang melawan penjajah. Setelah era 90-an, peran pesantren sebagai agen perubahan juga tampak dari semakin banyak tokoh Islam yang diakomodasi oleh penguasa Orde Baru saat itu.

Suharitini dalam Halim, dkk. menjelaskan bahwa dari segi sosial, pondok pesantren menjalankan empat fungsi utama.

1. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*).
2. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*).

3. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).
4. Pondok pesantren sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*).

Perkembangan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut tampak dari banyaknya pesantren-pesantren modern saat ini yang memiliki fasilitas-fasilitas yang luar biasa serta pelajaran-pelajarannya juga mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang dan tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat tidak berubah.

Pesantren di Indonesia ada dua macam, yaitu pesantren salafi dan khalafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih mempertahankan sistem (materi pengajaran) yang bersumber dari kitab-kitab klasik Islam atau kitab dengan huruf Arab (gundul). Pengetahuan non-agama tidak diajarkan dan sistem sorogan (individual) menjadi sendi utama yang diterapkan. Sebaliknya, pesantren khalafi menerapkan sistem madrasah, yaitu pengajaran secara klasikal. Di pesantren khalafi, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga pengetahuan umum dan bahasa Arab ataupun non-Arab serta berbagai keterampilan umum.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat terdiri atas dua kata, pemberdayaan dan masyarakat. Definisi pemberdayaan secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya (Depdiknas, 2003). Menurut Sadan (1997), pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan. Sementara, masyarakat didefinisikan oleh Koentjaraningrat (2009) sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Menurut

Mubarak (2010) pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Pendekatan proses mengusulkan agar masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan. Masyarakat terlibat dalam bentuk bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Artinya, perumusan program juga melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat juga turut menentukan arah pembangunan dan menjadi produsen, bukan hanya sebagai konsumen program. Dengan demikian, masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut sehingga lebih bertanggung jawab dan lebih termotivasi untuk menyukseskan program pembangunan serta bersedia untuk terus berpartisipasi pada tahap-tahap selanjutnya (Soetomo, 2006).

### **Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Edi Suharto (2014), pengembangan masyarakat adalah salah satu metode kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Pengembangan masyarakat mencakup beragam pelayanan sosial yang berbasis masyarakat. Pelayanan tersebut ada yang bersifat preventif, seperti program-program untuk mencegah anak-anak terlantar atau mengalami KDRT, dan ada yang bersifat kuratif, seperti pendampingan dan pengembangan bagi keluarga miskin.

Pengembangan masyarakat tentu harus dilakukan melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, dalam mengorganisasi pengembangan masyarakat, ada lima prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan. Isbandi Rukminto (2008) menerangkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

1. Penekanan terhadap pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengannya. Pertimbangan atas keseluruhan kehidupan masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian ataupun pengembangan masyarakat. Bukan hanya dilakukan untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, melainkan

dilakukan pengembangan yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2. Perlu adanya kedekatan antartim dalam pengembangan masyarakat. Kedekatan di sini tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multilapisan profesi karena dalam pengembangan masyarakat diperlukan adanya keterlibatan baik layanan yang profesional maupun subprofesional.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa pada wilayah pedesaan, yang berarti petugas harus bisa bekerja pada berbagai pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Petugas yang terlibat dalam pengembangan masyarakat harus melakukannya berdasarkan panggilan hati dan tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada. Artinya, petugas harus mau mendampingi masyarakat hingga mereka menjadi maju dan tidak berhenti setelah selesai memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat sasaran.
5. Prinsip kemandirian menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat.

### **Model-Model Pengembangan Masyarakat**

Terdapat tiga model dalam memahami konsepsi pengembangan masyarakat yang dijelaskan oleh Jack Rohman dalam Suharto (2014).

1. Pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan ini ditujukan untuk membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang maju bagi masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri secara aktif serta atas inisiatif dari mereka. Masyarakat bukan sekedar konsumen pembangunan, namun mereka dipandang sebagai masyarakat yang memiliki potensi.
2. Perencanaan sosial. Pengembangan masyarakat dianggap sebagai proses pragmatis pengambilan keputusan dan penetapan aksi-aksi yang diperlukan sebagai solusi bagi berbagai permasalahan sosial ekonomi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan masyarakat, kenakalan remaja, dan lainnya. Oleh karena itu, model ini lebih berorientasi pada tujuan tugas.

3. Aksi sosial. Pengembangan masyarakat dalam model ini berbentuk aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan.

### **Proses Pengembangan Masyarakat**

Prinsip yang paling dasar dalam pengembangan masyarakat adalah melakukannya melalui pendekatan *bottom-up*, yaitu perubahan dilakukan dari bawah dan melibatkan partisipasi dari masyarakat sendiri. Namun, pengembangan masyarakat tidak hanya harus berpijak pada partisipasi, tetapi juga pada hasil dan tujuan. Adapun penekanan pengembangan masyarakat yang diarahkan pada proses bukan pada hasil merupakan penekanan yang sama radikalnya pada perubahan dan partisipasi dari bawah. Proses-proses pengembangan masyarakat tersebut meliputi integritas proses, peningkatan kesadaran, langkah pengembangan, dan konsensus (Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008).

Suharto (2014) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat secara konseptual dapat dilihat dari asal kata pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*). Kata tersebut diambil dari kata dalam Bahasa Inggris *power* sehingga gagasan utama dalam pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Suharto, pemberdayaan adalah proses untuk mengubah orang atau kelompok yang tidak mampu, rentan, dan lemah menjadi memiliki kekuatan atau kemampuan dalam tiga hal: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan hanya bebas dalam berpendapat tapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya, memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan; dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

### **Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Teori dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga. Teori dapat mencakup suatu hal

atau situasi atau kondisi yang bersifat luas ataupun hanya mencakup hal yang ringkas. Teori menawarkan petunjuk mengenai hal-hal yang dapat atau seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat akan menjelaskan atau memberi petunjuk mengenai pola-pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu.

Pada umumnya, ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengungkap teori pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama adalah *deductive theory construction*, yaitu dengan melakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat berdasarkan teori yang sudah ada atau ditemukan sebelumnya. Pendekatan kedua adalah *constructive theory*, yaitu penemuan teori yang belum ada atau masih diduga melalui penelitian pada pemberdayaan masyarakat.

Peranan teori dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan ilustrasi mengenai distribusi sumber daya dan kekuasaan di masyarakat, fungsi organisasi di masyarakat, serta cara sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori dalam pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan sebab akibat yang harus dapat diuji secara empiris. Hubungan sebab akibat/*outcome* yang timbul dari suatu kegiatan atau kejadian tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial atau LSM dalam memproduksi *outcome*. Teori tersebut dapat digunakan untuk menentukan jenis kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi *outcome*/hasil dalam pemberdayaan masyarakat. Umumnya, beberapa teori digabung untuk memproduksi model *outcome*.

### ***Teori Ketergantungan Kekuasaan***

Kekuasaan merupakan konsep kunci untuk memahami proses pemberdayaan. Dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial, kekuasaan telah menjadi bagian yang melekat. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat, bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997). Pemikiran modern tentang kekuasaan dapat ditemukan dalam karya-karya Nicollo Machiavelli (*The Prince*, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (*Leviathan*, pertengahan abad ke-17). Dalam pemikiran modern, kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah berpartisipasi dari suatu kelompok dalam proses pengambilan keputusan sekaligus untuk mendapatkan persetujuan pasif dari kelompok tersebut atas keputusan yang diambil penguasa. Abbott (1996: 16–17) menilai bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan

hubungan pengaruh kekuasaan di samping kesetaraan dan konflik agar berhasil atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

Kemudian, muncul teori baru mengenai kekuasaan yang disebut teori ketergantungan-kekuasaan. Pada dasarnya, teori ketergantungan-kekuasaan memaparkan bahwa terdapat hubungan yang timpang antarnegara, khususnya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Abbott (1996: 20) kemudian menyadari bahwa dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat. Pemikiran tersebut dikenal sebagai teori keadilan.

Ilustrasi mengenai teori ini kurang lebih sebagai berikut. Teori ketergantungan-kekuasaan mengusulkan bahwa pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi nonprofit/LSM sebaiknya tidak menerima dana dari hanya satu donor jika ingin merdeka/bebas.

Pada konteks pemberdayaan masyarakat, teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Sekelompok masyarakat membutuhkan modal/keuangan yang kuat untuk mencapai suatu kondisi yang berdaya atau mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat memerlukan modal/uang dan massa yang besar.

### ***Teori Sistem***

Talcott Parsons (1991) memiliki asumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Tidak heran, komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Pemberdayaan masyarakat mengharuskan adanya perubahan. Menurut Parsons, saat terjadi perubahan di masyarakat, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Parsons, mengikuti para pendahulunya, juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup.

Parson telah melahirkan teori fungsional tentang perubahan dan termasuk dalam golongan yang memandang proses perubahan secara optimis. Ia menyebutkan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu adaptasi,

pencapaian, integrasi, dan pemeliharaan pola. Fungsi adaptasi diperlukan agar sistem dapat mencegah dan mengatasi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Hubungan antarbagian yang menjadi komponennya harus teratur dan terintegrasi sehingga fungsi integrasi diperlukan. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, teori sistem sosial menawarkan gagasan bahwa masyarakat memerlukan suatu sistem agar dapat bertahan dan menjadi lebih kuat. Apabila fungsi-fungsi dalam sistem masyarakat berjalan dengan baik maka pemberdayaan masyarakat berkemungkinan besar untuk sukses.

### ***Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)***

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Secara naluriah, manusia akan berkumpul membentuk kelompok. Manusia merupakan manifestasi makhluk sosial, yang hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan manusia.

Di dalam organisasi, terdapat struktur, yaitu kerangka yang menunjukkan hubungan antara satuan-satuan yang ada dalam organisasi serta menjelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing pejabat. Struktur organisasi akan tampak lebih jelas jika diilustrasikan dalam bentuk bagan organisasi. Setiap pengurus dan anggota organisasi memiliki peranan masing-masing.

Alasan seseorang masuk ke dalam sebuah organisasi bermacam-macam. Utamanya, mereka masuk ke suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk pemenuhan sandang pangan, perlindungan, cinta dan kasih sayang, pergaulan, maupun kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia yang saling mempengaruhi membawa banyak manfaat bagi kehidupan dibandingkan jika hidup sendirian. Apalagi, manusia memiliki banyak kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, keberadaan kelompok merupakan suatu keharusan.

Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari dan menerangkan kerja sama pada setiap individu. Lubis dan Husaini (1987) mengemukakan bahwa teori organisasi

adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerja sama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kenyataan bahwa individu berkelompok untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori dapat menjelaskan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerja sama.

Pada teori ekologi, organisasi merupakan wadah bagi sekumpulan masyarakat yang memiliki tujuan sama agar dapat berjalan secara teratur, jelas, dan kuat. Oleh karena itu, orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki daya. Suatu kelompok dapat dikatakan berdaya jika mempunyai organisasi yang kuat dan berkelanjutan.

### ***Teori Konflik***

Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam semua level kehidupan masyarakat. Interaksi akan menyebabkan orang-orang saling bersinggungan dan dari sinilah konflik dapat muncul. Setiap konflik pasti akan menimbulkan kerugian, baik bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, muncullah upaya-upaya untuk meminimalkan kerugian tersebut. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu melekat dalam interaksi sosial. Konflik bahkan dianggap sebagai motor pergaulan yang melahirkan dinamika dalam masyarakat.

Teori-teori konflik berusaha menjelaskan mengenai konflik dari berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi. Pendekatan ini menerangkan bahwa konflik timbul diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan, yang menyebabkan orang-orang bersikap individualis dan berusaha untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu komoditas dan sebaliknya juga membuka kerja sama di antara para pelaku (Chalid, 2005).

Proses pemberdayaan di suatu lingkungan sosial melibatkan interaksi masyarakat sehingga pasti akan menemui konflik. Namun, konflik yang timbul bukan berasal dari ketimpangan ekonomi, melainkan terkait dengan masalah kepercayaan dan kekhawatiran akan perubahan. Wajar jika masyarakat menghindari perubahan, apalagi

jika mereka harus mengubah kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang sudah mereka anut sejak lama. Hal ini sesuai dengan pendapat Stewart (2005, dalam Chalid, 2005) yang mengemukakan bahwa ada tiga model yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, yaitu penjelasan budaya, penjelasan ekonomi, dan penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung lahir dari isu perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Namun demikian, para antropolog masih memperdebatkan pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Terdapat argumentasi bahwa penjelasan konflik tidak dapat ditekankan pada aspek budaya tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Perspektif ekonomi menjelaskan bahwa konflik muncul diakibatkan hal-hal yang berkaitan dengan modal sebagai sarana untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan mandiri.

Pandangan lain menjelaskan konflik dalam aspek yang menyangkut organisasi. Apabila suatu kelompok dapat mengelola konflik dengan baik, konflik justru dapat menjaga keutuhan dan memperkuat organisasi. Konflik yang dikelola akan melahirkan persaingan yang sehat dan membangun.

### **Teori Mobilisasi Sumber Daya**

Pragmatisme, feminisme, dan hal-hal terkait dengan berbagai tradisi telah mendorong munculnya berbagai studi mengenai aksi-aksi individu (*individual action*) dan aksi-aksi kolektif (*collective action*) sejak tahun 1960-an. Beberapa penelitian yang terinspirasi dari teori-teori besar tersebut di antaranya penelitian mengenai perlawanan (*social resistance*), gerakan sosial (*social movement*), dan tindakan kolektif (*collective behavior*).

Gerakan sosial terdiri atas individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat (Jasper, 2010). Hal ini diakui di dalam pendekatan pilihan rasional, yang dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang menekankan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) dan interaksi dengan negara. Rusmanto (2013) menyimpulkan bahwa keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan akhir orang tersebut. Untuk mengetahui keinginan

seseorang maka harus mengetahui tujuannya. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik untuk menggerakkan seseorang.

Pada konteks pemberdayaan masyarakat, teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat. Untuk melakukan perubahan di masyarakat dari takberdaya menjadi berdaya, tidak hanya diperlukan kekuasaan, uang, dan pengetahuan, tetapi individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri yang ikut bergerak. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, dan kekuatan itu akan memberikan daya pada masyarakat.

### **Teori Konstruktivisme**

Konstruktivisme merupakan teori pengetahuan yang berakar dari filosofi, psikologi, dan sibernetika (Glaserfeld, 1987). Konstruktivisme radikal dianggap selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun yang dihasilkan dari komunikasi atau pikiran yang sehat. Dengan demikian, pengetahuan dibangun melalui pikiran yang sehat dan komunikasi atau bentukan kita sendiri. Kognisi bersifat adaptif dan membiarkan sesuatu untuk mengorganisir pengalaman dunia itu, bukan untuk menemukan suatu tujuan kenyataan. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual (Windschitl, dalam Abbeduto, 2004).

Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu perbuatan menciptakan sesuatu makna dari hal-hal yang dipelajari. Berbeda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respons, teori konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar dinilai lebih penting.

Teori konstruktivisme dapat diterapkan pada proses pemberdayaan masyarakat dengan menanamkan dan mengupayakan agar masyarakat dapat mengonstruksi pemahaman untuk berubah. Nilai-nilai yang telah melekat di masyarakat sebaiknya tetap dipertahankan selama nilai tersebut baik dan benar. Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan mengonstruksikan kembali nilai-nilai kebersamaan, gotong-

royong, keikhlasan, kejujuran, dan kerja keras sehingga dapat menjadi mesin penggerak bagi perubahan masyarakat kepada kemajuan. Aspek ilmu pada nilai-nilai kebaikan yang mulai pudar dibangun dan ditanamkan kembali serta secara kuat pada masyarakat itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan penyampaian data dalam bentuk verbal dan lebih menekankan pada permasalahan kontekstual dan tidak terikat dengan angka-angka dan perhitungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Desa Selopampang dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber artikel jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber relevan lainnya terkait objek penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung melakukan usaha yang maksimal dalam memberdayakan semua sumber daya untuk mengelola kekuatan besar perekonomian masyarakat sekitar Desa Selopampang. Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah mendapat fungsi tambahan dalam memberdayakan masyarakat, selain sebagai lembaga sosial dan pendidikan, Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung memiliki peran strategis dalam ekonomi syariah, meliputi peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini merupakan pengakuan atas Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah pada sumber daya manusia, yaitu pengkaderan ulama dan dai yang berintegritas. Sumber daya manusia ulama dan dai merupakan agen profesional ekonomi syariah dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Peran ulama dan dai adalah melakukan sosialisasi ekonomi syariah, dengan keilmuan fikih muamalah, serta mendeskripsikan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat dengan lebih baik. Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung berperan dalam pengaplikasian teori ekonomi syariah pada aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan. Peranan strategis Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung adalah sebagai pendamping masyarakat. Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung

berusaha mengembangkan potensi ekonomi syariah untuk membebaskan masyarakat dari bentuk-bentuk riba, maysir, garar, *risywah*, zalim, jual beli barang haram, serta model-model sistem maksiat lainnya. Ekonomi konvensional jelas-jelas menghadang ekonomi syariah bila Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung pasif dan apatis pada lingkungan sekitar Desa Selopampang.

Pada umumnya, pondok pesantren bergerak pada bidang pertanian, melakukan pemberdayaan pertanian, lain halnya dengan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung yang bergerak pada bidang industri kerajinan UMKM. Eksistensi Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung pada dunia usaha memerlukan inovasi dalam proses pengembangan produk. Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung melakukan segmentasi produksi dalam pemberdayaan lahan tidur di lingkungan sekitar desa Selopampang dan memanfaatkan tenaga kerja dan khususnya teknologi dalam menghasilkan produk-produk usaha.

Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan agenda kegiatan program pengembangan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung pada porsinya sebagai lembaga sosial. Upaya tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang mampu membangun jiwa *entrepreneurship*, baik pada santri, pengelola ekonomi, maupun masyarakat, sehingga cita-cita pondok pesantren dalam upaya mengembangkan ekonomi dapat berjalan dan sesuai harapan. Adapun kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung dalam upaya peningkatan *entrepreneurship* adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan

Pengembangan mutu pekerja dilakukan dengan diklat mengenai keuangan syariah, pengikatan agunan, *marketing*, dan *leadership* serta pelaksanaan uji kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional secara berkala per semester. Pemberian pelatihan *entrepreneurship* dilakukan secara persuasif, melalui halaqah, dengan membangun kreativitas kaum ibu-ibu dalam perkumpulan, serta melalui partisipasi bersama dalam membangun lembaga keuangan dan penyediaan modal usaha (Moh. Bahri, 2018).

2. Pendelegasian untuk peningkatan mutu dalam lingkup membangun *spirit entrepreneurship*.

3. Studi banding/kerja sama

Salah satu kegiatan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung adalah mengedepankan pengembangan *entrepreneurship* melalui studi banding serta kerja sama dengan lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah.

### **Potensi Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung**

Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung mempunyai potensi untuk membantu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Potensi sumber daya manusia Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung yang memiliki bermacam-macam pendidikan formal (Mts, MA, dan SMK Grafika) diharapkan mampu untuk melatih dan mendidik seluruh santri ke depannya sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi masyarakat dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang telah didapatkan dari Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung, termasuk mengajarkan keuangan syariah atau perbankan syariah.

Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Ide pemberdayaan mempunyai dua kecenderungan apabila dilihat dari proses operasionalisasinya, yaitu kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primer merupakan kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu sehingga menjadi lebih berdaya. Proses ini juga mencakup pembangunan aset material yang dapat digunakan secara produktif oleh masyarakat ke depannya, yang berarti membangun kemandirian masyarakat. Kecenderungan sekunder adalah kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung terlibat dalam aktivitas perekonomian yang nyata sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk usaha ekonomi yang dikembangkan adalah berupa

usaha internal pondok pesantren yang meliputi beberapa macam unit usaha internal, antara lain sebagai berikut.

1. Unit usaha produktif. Usaha produktif yang dilakukan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung salah satunya adalah dapur konsumsi santri Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Unit dapur santri dikelola secara kelembagaan untuk menjadi penyedia konsumsi santri dan guru/ustaz dan ustazah. Ini merupakan usaha produktif pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi masyarakat karena turut melibatkan masyarakat sekitar dan keluarga pesantren dalam penyediaan bahan baku produksi.
2. Pertokoan/ritel. Pertokoan adalah salah satu aktivitas yang dijalankan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung dalam upaya mengembangkan ekonomi pondok pesantren. Masyarakat sekitar Desa Selopampang pun ikut kebagian rezeki karena memberi masyarakat lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi menyediakan beberapa kebutuhan santri dan masyarakat, seperti bahan-bahan sembako, pakaian, aksesoris, alat-alat mandi, dan alat-alat sekolah lainnya. Peluang usaha ini cukup menjanjikan, apalagi jika produk yang dijual diminati dan dibutuhkan oleh santri maupun pegawai pesantren lainnya. Produk yang dijual bisa berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang lainnya (Sugandi dkk., 2017).

Selain mengembangkan unit usaha internal, Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung juga turut membangun *entrepreneurship* eksternal. Perwujudan dari hal ini adalah dalam bentuk berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Selopampang. Utamanya, mereka menjadi *supplier* makanan ringan kepada santri di Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung melalui penitipan makanan ringan di kantin dan koperasi yang ada di Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung atau di warung-warung sekitar pondok.

Menurut keterangan Mbah Man, salah seorang warga Desa Selopampang yang berjualan nasi goreng, mi goreng, mi rebus, dan makanan khas desa, rata-rata harga barang yang dijual mengikuti kondisi santri, jauh di bawah harga normal umumnya. Harga nasi goreng, mi goreng, dan mi rebus hanya Rp5.000, bahkan kadang Mbah Man

mempersilakan santri untuk makan lebih dahulu bila tidak memiliki uang, nanti ketika santri dapat kiriman dari orang tuanya bisa dibayarkan belakangan, namun bila tidak memiliki uang sama sekali dirinya tidak memungut pembayaran atas nasi goreng, mi goreng, atau mi rebus yang dimakan santri. Hal ini dilakukan Mbah Man selaku masyarakat dan penjual makanan agar santri dapat merasakan makanan yang lain dari dapur. Harapan Mbah Man, santri dapat betah tinggal di pondok pesantren untuk nyantri menimba ilmu.

Di samping membangun *entrepreneurship* eksternal, Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung juga memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan edukasi *entrepreneurship* pada santri. Hilirisasi pada lulusan pesantren umumnya menjadi profesional hukum ekonomi syariah, atau ahli agama yang mendakwahkan ilmunya kepada masyarakat. Namun, tidak 100% lulusan pesantren menjadi ustaz maupun tokoh agama, banyak juga lulusan pondok pesantren dengan profesi lain, bahkan ada yang menjadi pengusaha. Pelatihan *entrepreneurship skill*, terutama *entrepreneurship* dari pondok pesantren dengan prinsip ekonomi syariah, dibutuhkan bagi para santri. Mempersiapkan santri dalam dunia bisnis dengan standar keilmuan untuk dapat melakukan inovasi membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberdayakan perekonomian umat. Santri dapat mengedukasi masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat umum. Hal ini menjadi bagian sistem dakwah pemberdayaan, yaitu kegiatan dakwah tentang cara berbisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Al-Quran memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dua prinsip, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip *syura* (Istan, 2017). Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak pondok pesantren, masyarakat, dan lembaga pemerintah Desa Selopampang.

Ketiga pihak ini bekerja sama secara harmonis agar dapat memberdayakan perekonomian umat secara berkelanjutan. Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung memberdayakan perekonomian masyarakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat berdasarkan ekonomi syariah. Masyarakat sekitar Desa Selopampang dapat berpartisipasi pada program-program pemberdayaan yang dibuat Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Sementara, pemerintah Desa Selopampang dapat mendukung dan

mengawasi program yang dibuat Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung.

Prinsip *syura* bermakna musyawarah, dalam hal ini musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat, dan Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Selopampang dapat melakukan agenda dengan musyawarah bersama Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung tentang program yang dibuat oleh Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Pemerintah Desa Selopampang menjadi fasilitator dan regulator dalam program pemberdayaan masyarakat bersama Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung memiliki peranan strategis dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Selopampang. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, ketiga unsur, yaitu Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung, pemerintah Desa Selopampang dan masyarakat Desa Selopampang, bersama-sama menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat. Dengan demikian, usaha pemberdayaan umat dan masyarakat dapat menjadi terukur dan komprehensif.

Pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat meliputi penciptaan peluang usaha, lapangan pekerjaan, badan usaha, lembaga keuangan syariah, dan lembaga sosial Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat berbasis pesantren strategis untuk dikembangkan dengan kearifan lokalnya secara efektif. Pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat berbasis pesantren merupakan ladang amal dengan berdakwah pemberdayaan umat dan masyarakat serta *welfare state* sebagai tujuan bernegara. Membaiknya perekonomian umat dan masyarakat dengan hukum dan ekonomi syariah menjadi *blueprint* kemajuan desa menuju *welfare state*.

Substansi keilmuan fikih muamalah secara teoretis pada Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung seharusnya sejalan untuk diaplikasikan dalam penyelesaian isu-isu keumatan dan masyarakat pada transaksi yang bersih dan syar'i. Hal ini sebagai upaya untuk memfilter umat dan masyarakat ketika

berhadapan dengan riba pada sistem kapitalis. Sistem ekonomi konvensional tak dapat dihindari umat dan masyarakat. Propaganda sistem kapitalis itu akan membelit siapapun, termasuk para ulama, ustaz dan ustazah, serta santri pondok dengan cara melegitimasi sistem riba pada ekonomi konvensional dengan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-kitab kuning. Ketidakberdayaan pondok pesantren ini seharusnya dapat diawasi dan dilakukan intervensi dengan memahami bahwa kajian keilmuan hanya berdasarkan sumber dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning kontemporer, belum dilakukan proses pembelajaran, di mana institusi dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berproses.

Seharusnya, pembahasan perkembangan ekonomi dilakukan dengan memahami realitas yang ada. Lalu, perlu dilakukan aktualisasi teori-teori fikih muamalah agar umat dan masyarakat dapat memahami substansi konsepsi dari kitab kuning. Perlu kiranya teori-teori klasik pada kitab kuning dilakukan pembahasan dengan bahasa kontemporer agar konsepsi yang masih abstrak itu menjadi konkret dan terukur.

Selanjutnya, proses belajar-mengajar yang dikembangkan masih diorientasikan pada tujuan, bukan pada bahan materi. Santri seharusnya tidak dinilai dari penguasaan materi-materi yang ditransfer dari kitab kuning yang berorientasi pada hafalan yang baik, namun dari kemampuan santri pada substansi materi-materi atas dinamika masyarakat yang cepat berkembang. Kecenderungan pendekatan doktrin yang monoton berakibat pada minim narasi dan kreativitas keilmuan santri karena minimnya literasi. Santri harus diberikan pemahaman secara filosofis dan yuridis mengenai sistem ekonomi konvensional ketika berhadapan dengan ekonomi syariah sehingga santri mendapat perubahan perspektif mengenai ekonomi syariah. Dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama seharusnya dipelajari untuk menganalisis perbandingan yang dapat diukur demi kemaslahatan umat dan masyarakat.

Pembaruan dan perubahan merupakan keharusan pada kehidupan manusia yang terus berkembang. Secara berkala, pembaruan diperlukan dan harus dilakukan oleh pondok pesantren. Hal ini untuk optimalisasi peran pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah dengan kearifan lokal di lingkungan sekitarnya.

Usaha Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Selopampang, pada hilirisasinya, berproses pada tahapan modernisasi yang membawa kemaslahatan masyarakat. Dengan

demikian, bisa saja pondok pesantren memiliki dimensi fungsi baru setelah melakukan pembaharuan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, A. Z. (2018). Strategi Mewujudkan Kemandirian dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(9).
- Alhifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Daarut Tauhid dan BMT Daarut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 13(4).
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan Pesantren di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1).
- Asrohah, Hanun. (2004). *Pelebagaan Pesantren, Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018 (No. 07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahri, Moh. (12 April 2018). *Wawancara*. Manajer BMT Pusat.
- Chotimah, K. (2016). Komunikasi Antarpribadi Remaja Lapas dengan Pendamping (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antarpribadi Remaja di Lapas Klaten dengan Pendamping Yayasan Sahabat Kapas Mencapai Keterbukaan Diri). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Faozan, Akhmad. (2006). Pondok Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ibadah*, 4(1).
- Fathoni, Muhammad Anwar & Rohim, Ade Nur. (2019). Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*.
- Fauzi, Yusni. (2012). Peran Pesantren dalam Upaya Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Entrepreneurship, (Penelitian Kualitatif Di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Bandung).” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 6(1).
- Fitrianto, Achmad Room. (n.d.). Peran Pesantren dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat. *Artikel (Diskusi Panel Penguatan Ekonomi Pesantren Dan Tantangan Perubahan Oleh Center For Islam And Democracy Studies*.

- Ghazali, M. Bahri. (2002). *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: CV Prasasti.
- Herman. (2013). Sejarah Pesantren di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2).
- Hidayat, T. (2016). *Peran Pesantren dalam Mengusir Segala Bentuk Penjajahan*.  
<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/10/17/of6exr396-peranpesantren-dalam-mengusir-segala-bentuk-penjajahan>.
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat menurut Perspektif Islam. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Ife, Jim, & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jasper, James M. (2010). Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action? *Sociology Compass*, 4(11), 965–976.
- Jimu, M. I. (2008). Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa Development*, 33(2), 23–3.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Longman.
- Laelasari, N., Safei, A. A., & Azis, A. (2017). Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 80–99.
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 53–64.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1227465>
- Marlina. (2014). Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12(1).
- Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis*. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro Semarang.
- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2).

- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nurjamilah, C. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93–119.
- Rusmanto, Joni. (2013). *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Rusmini. (2016). Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 2(2).
- Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompok Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.15575>
- Shucksmith, Mark. (2013). *Future Direction in Rural Development*. England: Carnegie UK Trust.
- Sipahelut, Michel. (2010). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugandi, A., Tanjung, H. B., & Rusli, R. K. (2017). Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tabdir Muwahhid*, 1(2), 99–115.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmaniar. (2007). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pascatsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Usman, M. I. (2013). Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal Al Hikmah*, 16(1).
- Wahid, Marzuki. (2001). *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Hidayah.
- Wadi, Moh. (2020). Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1).

